



PEKERJA HONORER ALIH PROFESI KORBAN PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFIS
Pemangkasan Danais Tak Boleh Jadi Alasan PHK

FRAKSI PARTAI GERINDRA
 Krisnadi Setyawan



KOTA YOGYAKARTA

realitas dan aspek sosial. Hal ini masih banyaknya korban penataan kawasan yang sudah kadung menjadi support system penataan kawasan tersebut. Sepuluh tahun lebih alih profesi dari tukang parkir dan pedagang menjadi petugas ketertiban kawasan Gumaton (Tugu, Malioboro dan Kraton) terancam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dipangkasnya alokasi Dana Keistimewaan (Danais) dari pusat. Warga kawasan Alun-alun Utara yang aktif berpartisipasi membantu Kraton dan Pemda DIY selama ini beralih profesi menjadi petugas ketertiban, pedagang kuliner maupun driver shuttle wisata Jeron Beteng. Sebagai petugas



KR-istimewa

YOGYA (KR) - Penataan Kawasan Sumbu Filosofi dalam hal ini Kraton, Malioboro dan Tugu tidak hanya memperhatikan aspek fisik konstruksi saja. Akan tetapi juga harus melihat ketertiban outsourcing pada UPT KCB Dinas Kebudayaan Kota Yogya, penghasilannya sesuai dengan UMR Kota Yogya. Anggaran tersebut berasal dari BKK Danais dari Pemda DIY ke APBD Kota Yogya sejak tahun 2014 silam saat penataan kawasan Alun-alun Utara dimulai. Sebenarnya sudah beberapa kali petugas ketertiban ini kena PHK, terdampak pemotongan alokasi anggaran Danais di Pemkot Yogya. Alasan PHK tersebut karena ada pemotongan dari pusat tapi yang dikorbankan adalah masyarakat yang secara langsung menjadi support system. Sedangkan proyek fisik seperti pembangunan Beteng dan pembelian lahan berjalan terus.

PHK ini menunjukkan tidak adanya empati baik dari Kraton maupun Pemda DIY untuk warga yang sudah berpartisipasi mendukung penataan kawasan. Bahkan semakin ke sini partisipasi warga terus diabaikan mulai dari penggusuran PKL Malioboro, pemindahan Teras Malioboro 2 dan terakhir relokasi eks parkir dan PKLABA.

Perlakuan aparat pemda DIY yang tidak mau menanggapi suara masyarakat ini disinyalir agar belanja penataan kawasan lebih besar untuk konstruksi fisik dibandingkan membangun partisipasi sosial dan alih profesi warga terdampak. Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Yogya, saya menolak keras adanya PHK bagi warga terdampak penataan kawasan yang saat ini sudah bekerja sebagai support system Kawasan Sumbu Filosofi.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005